

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Soekartawi, 2005).

Padi merupakan tanaman pangan kelompok serealea yang banyak diusahakan oleh petani di Indonesia. Berdasarkan luas lahan tanaman pangan, padi menempati urutan pertama setelah jagung. Tanaman ini juga penting bagi suplai pangan di Indonesia karena mengandung nilai gizi tinggi seperti halnya protein, lemak, hidrat arang, mineral dan vitamin. Oleh sebagian besar masyarakat padi digunakan sebagai bahan makan pokok (Anonim, 2006).

Beras merupakan sumber makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanaman padi cocok dibudidayakan didaerah pantai sampai ketinggian 2400 meter diatas permukaan laut, mulai dari posisi 53 ° lintang utara sampai 35-40 ° lintang selatan. Padi sebagai tanaman semiaquatis ditanam dilahan tergenang (Istiyastuti dan Yanuharso, 1996).

Menurut Sutanto (2002), beras yang dihasilkan dari tanaman padi merupakan makanan pokok lebih dari separo penduduk Asia. Sekitar 1.750 juta jiwa dari sekitar tiga miliar penduduk Asia, termasuk 200 juta penduduk Indonesia, menggantungkan kebutuhan kalorinya dari beras. Sementara di Afrika dan Amerika Latin yang berpenduduk sekitar 1,2 miliar 100 juta di antaranya pun hidup dari beras. Oleh sebab itu, di negara-negara Asia beras memiliki nilai

ekonomi sangat berarti. Di Indonesia, beras bukan hanya sekedar komoditas pangan, tetapi juga merupakan komoditas strategis yang memiliki sensitivitas politik, ekonomi dan kerawanan sosial yang tinggi. Demikian tergantungnya penduduk Indonesia pada beras maka sedikit saja terjadi gangguan produksi beras, pasokan menjadi terganggu dan harga jual meningkat. Kenyataan seperti ini membuat pemerintah orde baru (1967–1998) menjadikan beras sebagai alat tawar – menawar politik untuk mempertahankan kekuasaannya.

Peningkatan produksi padi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras penduduk yang semakin bertambah. Perlu diingat bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 2,32% pertahun. Sehubungan dengan laju pertumbuhan penduduk, seharusnya produktivitas pertanian perlu ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pengadaan bahan pangan, khususnya padi. Ada beberapa macam usaha untuk meningkatkan produksi padi, antara lain dengan melaksanakan: pola tanam secara ketat, pengaturan pergiliran tanam, pola tanam tumpangsari, penggunaan zat pengatur tumbuh, dan menerapkan berbagai teknologi maju Supra Insus dan teknologi Panca Usahatani (Warisno, 1998).

Usaha meningkatkan produksi padi dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi adalah usaha peningkatan produksi padi dengan memperluas lahan. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi padi yang dilakukan dengan panca usahatani, meliputi : penggunaan varietas unggul, pemupukan berimbang dan tepat waktu, pengairan yang cukup, pengendalian gangguan hama penyakit tanaman serta teknik budidaya yang tepat (Mardjuki, 1990).

Menurut Irawan (2004), sebagai komoditas yang bernilai tawar politik sangat tinggi, pemerintah berobsesi untuk berswasembada beras. Segala daya upaya ditempuh agar terwujud target produksi. Intensifikasi pertanian pun efektif diterapkan. Teknologi pertanian melalui bibit unggul, pemupukan, dan pemberantasan hama penyakit diadopsi. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Tahun 1985 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, dimana kebutuhan beras seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, bahkan dapat melakukan ekspor 2 tahun berikutnya berturut-turut, Namun sejak saat itu Indonesia menjadi negara pengimpor beras, yang disebabkan oleh beberapa kejadian simultan seperti : (a) peningkatan produksi yang semakin menurun (b) Alih fungsi lahan di Jawa (c) kegagalan panen karena bencana alam dan serangan OPT (d) penambahan penduduk (e) kurang berhasilnya program diversifikasi pangan bahkan semakin banyak penduduk yang justru beralih ke makanan pokok beras. Tabel 1.1 menunjukkan impor beras Indonesia periode 1999-2003.

Tabel 1.1 Produksi, Impor, Rasio Ketergantungan Impor, Rasio Swasembada

| Tahun | Produksi | Impor | Ekspor | Vol. Perdag. dunia | Rasio Keterg. Impor | Rasio Swa | Rasio Impor-Vol |
|------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | Sembada | Perdag. Dunia |
| | | (1000 ton) | | | (%) | | |
| 1995 | 32.334 | 3.014 | 0 | - | 8,5 | 91,5 | - |
| 1996 | 33.216 | 1.090 | 0 | 19.664 | 3,2 | 96,8 | 5,5 |
| 1997 | 31.206 | 406 | 0 | 18.854 | 1,3 | 98,7 | 2,2 |
| 1998 | 31.118 | 6.080 | 0 | 27.670 | 16,3 | 83,7 | 22,0 |
| 1999 | 32.148 | 4.183 | 0 | 24.925 | 11,5 | 88,5 | 16,8 |
| 2000 | 32.040 | 1.512 | 0 | 22.896 | 4,5 | 95,5 | 6,6 |
| 2001 | 31.891 | 1.404 | 0 | 24.442 | 4,2 | 95,8 | 5,7 |
| 2002 | 32.130 | 3.707 | 0 | 27.883 | 10,3 | 89,7 | 13,3 |
| 2003 | 32.914 | 2.737 | 0 | 27.191 | 7,7 | 92,3 | 10,1 |
| Rerata | | | | | | | |
| 1995-1997 | 32.252 | 1.503 | 0 | 19.259 | 4 | 96 | 4 |
| 1998-1999 | 31.533 | 5.132 | 0 | 26.298 | 14 | 86 | 14 |
| 2000-2003 | 32.244 | 2.340 | 0 | 25.603 | 7 | 93 | 7 |

Sumber : Puspoyo (2004)

Keterangan:

Rasio ketergantungan impor = $\text{impor} / (\text{impor} + \text{produksi}) \times 100\%$

Rasio swasembada = $\text{produksi} / (\text{impor} + \text{produksi}) \times 100\%$

Menurut Puspoyo (2004), rata-rata ratio ketergantungan impor Indonesia periode 2000-2003 sebesar 7% atau setara dengan 9% dari total beras yang diperdagangkan di pasar dunia (Tabel 1.1). Ratio ketergantungan merupakan proporsi jumlah beras impor terhadap total beras yang tersedia. Sementara ratio swasembada merupakan proporsi jumlah produksi dalam negeri terhadap total beras yang tersedia. Mendasar pada data periode 2000-2003 berarti sumbangan produksi beras dalam negeri mencapai 93% dari total beras yang tersedia, sehingga Indonesia masih memerlukan beras impor untk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu upaya peningkatan produksi dan produktivitas masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Terlepas dari predikat Indonesia sebagai negara pengimpor beras, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang produksi beras nasional dengan perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas yang meningkat sebagaimana tercantum pada Tabel 1.2.

Perkembangan luas panen padi di Jawa Timur selama lima tahun terakhir (2007-2011) dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.2 Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Padi di Jawa Timur Tahun 2007-2011

| Tahun | Luas Lahan (ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (ku/ha) |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 2007 | 1.750.903 | 9.346.947 | 53,38 |
| 2008 | 1.736.048 | 9.402.029 | 54,16 |
| 2009 | 1.774.884 | 10.474.773 | 59,02 |
| 2010 | 1.904.830 | 11.259.085 | 59,11 |
| 2011 | 1.963.983 | 11.643.773 | 59,29 |
| Rata-rata | 1.826.130 | 10.425.321 | 56,992 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2013).

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa luas panen mengalami peningkatan pada periode 2007-2013 rata dari 1.750.903 ha menjadi 1.963.983 ha. Peningkatan luas lahan diikuti dengan peningkatan produksi dan produktivitas. Peningkatan produksi tersebut tidak lepas dari produktivitas lahan yang terus dipacu sehingga terus mengalami peningkatan per tahunnya hingga mencapai rata-rata sebesar 56,992 ku/ha.

Rata-rata Produktivitas padi Jawa Timur ternyata sama dengan produktivitas yang dicapai Kabupaten Jember, yaitu sebesar 57,0 ku/ha (Tabel 1.3)

Tabel 1.3 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Jember Tahun 2007-2012

| Tahun | Luas Lahan (ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (ton/ha) |
|------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 2007 | 144.260 | 773.786 | 5,49 |
| 2008 | 157.551 | 813.995 | 5,67 |
| 2009 | 159.130 | 880.750 | 5,70 |
| 2010 | 156.921 | 880.750 | 5,73 |
| 2011 | 161.262 | 830.855 | 5,32 |
| 2012 | 160.385 | 985.306 | 6,30 |
| Rata-rata | 156.585 | 860.907 | 5,70 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (2013).

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa luas panen meningkat pada periode 2007 - 2012 dari 144.260 ha menjadi 160.385. Hal ini diikuti dengan peningkatan produksi dari 773.786 pada tahun 2007 menjadi 985.306 pada tahun 2012. Peningkatan produksi tersebut mengakibatkan meningkatnya produktivitas lahan dari 54,9 pada tahun 2007 menjadi 63,0 pada tahun 2012 atau rata-rata sebesar 57,0 ku/ha pada periode 2007-2012.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas padi, petani dihadapkan pada

masalah pemilihan penggunaan modal dan teknologi yang tepat. Pemilihan kombinasi penggunaan teknologi dan modal seperti benih, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja yang tepat akan menjadi dasar dalam melaksanakan pilihan tersebut. Pilihan terhadap kombinasi penggunaan tenaga kerja, benih, pupuk, obat-obatan yang optimal, akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan kata lain suatu kombinasi input dapat menciptakan sejumlah produksi dengan cara yang lebih efisien (Soekartawi, 2002).

Upaya peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan petani padi di Kabupaten Jember sering dihadapkan dua masalah pokok, yaitu:

- a. Harga padi saat panen raya yang tidak menentu bahkan cenderung sering tidak menguntungkan petani. Hal ini menyebabkan banyak petani padi mengalami masalah keterbatasan modal untuk membeli sarana produksi berupa benih, pupuk dan obat-obatan pada musim tanam berikutnya.
- b. Harga-faktor produksi yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, terutama harga pupuk dan pestisida. Kondisi ini dapat menyebabkan semakin turunnya kemampuan petani membiayai usahatani sesuai anjuran sehingga dikhawatirkan dapat menurunkan produktivitas lahan.

Usahatani yang baik dan layak untuk dilanjutkan adalah usahatani yang produktif dan efisien. Efisiensi usahatani meliputi efisiensi teknis, efisiensi harga dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis akan tercapai bila petani mampu mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa sehingga produksi yang tinggi dapat tercapai. Petani dapat mengalokasikan harga faktor produksinya untuk mencapai efisiensi harga. Cara seperti itu dapat ditempuh misalnya dengan

membeli faktor produksi pada harga yang murah dengan menjual hasil pada saat harga yang relatif tinggi. Petani yang dapat meningkatkan produksi dan menjualnya dengan harga tinggi, serta dapat menekan harga faktor produksi maka petani tersebut telah melakukan efisiensi teknis dan efisiensi harga secara bersama-sama. Kondisi demikian disebut efisiensi ekonomi (Soekartawi, 1995).

Berdasar latar belakang tersebut, maka muncul pertanyaan bagaimanakah produktivitas lahan, keuntungan, dan efisien penggunaan biaya usahatani padi di Kabupaten Jember. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelitian pada salah satu kecamatan penghasil padi di Kabupaten Jember, yaitu Kecamatan Rambipuji yang mempelajari tentang usahatani padi di kecamatan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan tingkat produktivitas lahan antara usahatani padi lahan sempit dan luas di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
2. Apakah ada perbedaan tingkat efisiensi biaya antara usahatani padi lahan sempit dan luas di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
3. Apakah ada perbedaan tingkat keuntungan antara usahatani padi lahan sempit dan luas di Kecamatan Rambipuji. Kabupaten Jember

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan produktivitas lahan antara usahatani padi lahan sempit dan luas di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui perbedaan efisiensi biaya antara usahatani padi lahan sempit dan luas di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui perbedaan keuntungan antara usahatani padi lahan sempit dan luas di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan bidang sosial ekonomi pertanian
2. Sebagai tambahan informasi bagi pemerintah daerah setempat dalam pengambilan kebijaksanaan pembangunan pertanian di pedesaan.
3. Bagi petani, hasil kegiatan diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan usahatani padi
4. Sebagai salah satu bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan usahatani padi